



PEMKAB. LUWU TIMUR

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, yang memuat tentang tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi pelaksana. Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kami menyadari dokumen Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu “Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Malili, April 2024


KEPAKABADAN
PENDAPATAN DAERAH,
MUHAMMAD SAID, SE,MM
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19790313 200502 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan	33
2.7. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Antar Perangkat Daerah.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	36
3.3 Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN	41
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	41
BAB V PENUTUP.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur keberadaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021.

Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sesuai amanat tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, adalah:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah melalui upaya yang makin inovatif melalui inovasi yang berkelanjutan yang merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya dan berdasar rencana kerja yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

- a. Sebagai acuan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- c. Memasukkan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.
- d. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun sebelumnya.
- e. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan dokumen RKPD Kabupaten Luwu Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja BAPENDA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat uraian tentang gambaran kedudukan Perangkat Daerah, rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen setiap BAB beserta Sub BAB sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun n-2/2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan..

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. .

2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan proses membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, baik kesesuaian rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dan indikatifnya.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan proses membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok

ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Menggambarkan dan menguraikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan dan menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menguraikan dan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti pencapaian visi dan misi kepala daerah dan pencapaian Indikator Kinerja Utama.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023 dan perkiraan realisasi target kinerja tahun 2025. Pengukuran Kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts), indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan , buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah evaluasi

kinerja dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek capaian pendapatan dan aspek pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

1. Aspek Capaian Pendapatan

Pekembangan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan target dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp.65.389.160.576,00 atau sebesar 20,10 % dari Rp. 325.302.193.230,00(tahun 2022) menjadi Rp. 390.691.353.806,00 (tahun 2023). Hal itu juga terjadi pada pertumbuhan realisasi pendapatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar Rp.53.696.797.166,00 atau sebesar 15,73 %. Naik turunnya penerimaan daerah disebabkan adanya dinamika terhadap subyek/objek pendapatan. Sebagai bahan telaahan dan data pembandingan berikut disajikan pencapaian realisasi pendapatan per jenis pendapatan tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.1

DATA PERKEMBANGAN PENDAPATAN TAHUN 2022 – 2023

URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	TARGET (Rp)	REALISASI		TARGET (Rp)	REALISASI	
	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	325.302.193.230,00	341.265.079.449,43	104,90	390.691.353.806,00	394.961.876.615,58	101,09
Pajak Daerah	189.380.000.000,00	202.810.479.953,20	107,09	238.588.526.149,00	246.712.996.065,59	103,41
Retribusi Daerah	4.833.681.025,00	3.181.939.987,00	65,83	5.177.658.500,00	2.981.187.069,00	57,58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.740.807.304,00	23.740.807.304,00	100,00	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00	100,00
Lain – Lain PAD yang Sah	107.347.704.901,00	111.531.852.205,23	103,89	123.336.593.699,00	121.679.118.021,99	98,66
Pendapatan Transfer	1.223.583.544.713,00	1.330.514.747.320,86	108,74	1.323.464.643.817,00	1.331.700.405.097,75	100,62
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.021.000.629.629,00	1.108.810.602.294,00	108,60	1.073.605.505.598,00	1.080.940.374.581,00	100,68
Dana Perimbangan	917.997.542.629,00	1.005.807.515.294,00	109,56	950.972.873.598,00	958.307.742.581,00	100,77
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00		11.794.502.000,00	11.794.502.000,00	100,00
Dana Desa	103.003.087.000,00	103.003.087.000,00	100,00	110.838.130.000,00	110.838.130.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Provinsi	202.582.915.084,00	221.704.145.026,86	109,44	249.859.138.019,00	260.760.030.516,75	100,36
Pendapatan Bagi Hasil	187.835.890.084,00	206.876.727.007,00	110,14	233.198.402.019,00	243.656.469.516,75	104,48
Bantuan Keuangan	14.747.025.000,00	14.827.418.019,86	100,55	16.660.736.000,00	7.103.561.000,00	
Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	67.983.619.868,00	60.881.616.139,00	89,55	62.452.286.000,00	51.688.884.198,00	82,77
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	47.500.000.000,00	35.292.704.251,00	74,30	50.904.000,00	46.177.358.606,00	90,71
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.602.000.000,00	7.144.000.000,00	445,94	11.548.286.000,00	5.511.525.592,00	47,73

Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan	18.881.619.868,00	18.441.911.888,00	97,67	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------	------	------	------

2. Aspek Capaian Program Kegiatan

Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai penjabaran P-APBD Kabupaten Luwu Timur TA. 2023 sebesar Rp. 15.841.470.050,00 yang terbagi atas Belanja Pegawai Rp. 8.392.365.630,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.762.339.920,00, dan Belanja Modal Rp. 1.686.764.500,00. Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebesar 96,93 % dengan realisasi Belanja sebesar Rp. 13.691.398.422,00. Realisasi kinerja Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Program/Kegiatan	Pelaksanaan			Keterangan
	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Kegiatan (%)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.214.238.750,00	96,50	98,95	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.064.600,00	97,41	100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.497.000,00	98,61	100	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.002.000,00	94,73	100	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.000.600,00	97,46	100	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.565.000,00	93,37	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.441.286.630,00	97,69	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.300.565.630,00	97,68	100	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.862.000,00	91,78	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	109.859.000,00	99,42	100	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.581.000,00	97,87	100	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.581.000,00	97,87	100	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	634.036.000,00	86,36	100	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60.226.000,00	93,85	100	
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	33.250.000,00	90,90	100	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	540.560.000,00	85,25	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	879.317.200,00	94,82	99,38	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.300.000,00	100,00	100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.182.000,00	100,00	100	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.131.000,00	99,91	100	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173.022.000,00	99,34	100	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	5.520.000,00	100,00	100	
Fasilitas Kunjungan Tamu	15.750.000,00	89,73	100	
Penyelenggaraan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	672.412.200,00	93,64	97,50	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.686.764.500,00	98,66	100	
Pengadaan Mebel	42.800.000,00	99,53	100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	882.564.500,00	99,05	100	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	761.400.000,00	98,16	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.258.820,00	85,90	100	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.554.520,00	87,08	100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.904.300,00	82,86	100	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.800.000,00	100,00	100	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202.930.000,00	81,93	97,62	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.920.000,00	76,88	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.010.000,00	77,86	71,43	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	97,75	100	
Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.627.231.300,00	98,37	100,36	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	233.511.000,00	99,82	100	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	334.871.000,00	99,04	100	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	395.515.000,00	95,60	100	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	281.220.280,00	99,84	100	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB_P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.205.086.000,00	97,92	108,83	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	320.404.020,00	99,96	100	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	118.674.000,00	93,61	100	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	166.257.000,00	98,25	100	
Penagihan Pajak Daerah	571.693.000,00	99,68	100	

C. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai Penjabaran P-APBD Kabupaten Luwu Timur TA.2023 sebesar Rp. 15.841.470.050,00 yang terbagi atas Belanja Pegawai Rp. 8.392.365.630,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.762.339.920,00 dan Belanja Modal Rp. 1.686.764.500,00 Hasil Evaluasi capaian Program Tahun 2023 dilihat dari realisasi keuangan telah tercapai sebesar 96,93 %, sedangkan rata – rata realisasi pelaksanaan kegiatan telah tercapai sebesar 99,86 %. Realisasi pelaksanaan kegiatan mendekati target dikarenakan kondisi nyata di lapangan menuntut Bapenda untuk terus melaksanakan kegiatan

pelayanan. Kegiatan tersebut menyesuaikan kebutuhan masyarakat Luwu Timur untuk mewujudkan pelayanan prima serta sebagai usaha Bapenda untuk mencapai target pendapatan daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dilihat dari realisasi anggaran sampai 31 Maret 2024 sebesar 28,09 % dan harapan keberhasilan kinerja 100 % pada akhir tahun 2024. Capaian Kinerja persentase penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2023 dengan target yang ditetapkan sebesar 95,20 % terealisasi 119,44%. Berikut realisasi kinerja Renstra 2021-2023, sebagaimana tabel T-C 29 berikut :

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021 s/d Tahun 2023
Bdan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

N o	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n- 2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)	
			5		6		7		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	98,00	48.293.415.126	0,00	-	95	12.214.238.750	-	11.787.308.504	0,00%	96,50%	95,50	11.787.308.504		24,41%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	200,00	365.394.000	0,00	-	100	89.064.600	100	86.784.290	100,00%	97,44%	100,00	86.784.290	50,00%	85,37%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangka daerah (Dokumen)	4,00	271.757.000	0,00	-	2	65.497.000	2	64.585.980	100,00%	98,61%	2,00	64.585.980	50,00%	23,77%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4,00	17.002.000	0,00	-	2	3.002.000	2	2.843.760	100,00%	94,73%	2,00	2.843.760	50,00%	16,73%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4,00	17.000.000	0,00	-	2	3.000.600	2	2.954.400	100,00%	98,46%	2,00	2.954.400	50,00%	17,38%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20,00	59.635.000	0,00	-	10	17.565.000	10	16.400.150	100,00%	93,37%	10,00	16.400.150	50,00%	27,50%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	193,40	38.557.432.484	0,00	-	100	8.441.286.630	100	8.245.897.268	100,00%	97,69%	100,00	8.245.897.268	51,71%	59,14%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48,00	37.883.961.484	0,00	-	24	8.300.565.630	24	8.108.353.058	98,96%	97,68%	23,75	8.108.353.058	49,48%	21,40%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	24,00	183.262.000	0,00	-	12	30.862.000	12	28.324.730	100,00%	91,78%	12,00	28.324.730	50,00%	15,46%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	38,00	490.209.000	0,00	-	19	109.859.000	19	109.219.480	100,00%	99,42%	19,00	109.219.480	50,00%	22,28%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen barang milik daerah yang disusun tepat waktu (%)	196,20	64.981.448	0,00	-	100	13.581.000	100	13.291.350	100,00%	97,87%	100,00	13.291.350	50,97%	20,45%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8,00	64.981.448	0,00	-	4	13.581.000	4	13.291.350	100,00%	97,87%	4,00	13.291.350	50,00%	20,45%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	190,20	1.212.021.259	0,00	-	100	634.036.000	99	547.572.665	99,07%	86,36%	99,07	547.572.665	52,09%	101,44 %
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	24,00	198.066.259	0,00	-	12	60.226.000	12	56.521.178	100,00%	93,85%	12,00	56.521.178	50,00%	28,54%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	200,00	159.065.000	0,00	-	150	33.250.000	150	30.225.000	100,00%	90,90%	150,00	30.225.000	75,00%	19,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	62,00	854.890.000	0,00	-	45	540.560.000	45	460.826.487	100,00%	85,25%	45,00	460.826.487	72,58%	53,90%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)	190,00	2.647.911.415	0,00	-	100	879.317.200	99	833.806.321	99,38%	94,82%	99,38	833.806.321	52,30%	146,28 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10,00	28.614.400	0,00	-	15	5.300.000	15	5.300.000	100,00%	100,00%	15,00	5.300.000	150,00%	18,52%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	12.687.565	0,00	-	2	2.182.000	2	2.182.000	100,00%	100,00%	2,00	2.182.000	50,00%	17,20%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	36,00	27.031.250	0,00	-	18	5.131.000	18	5.126.500	100,00%	99,91%	18,00	5.126.500	50,00%	18,97%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6,00	941.397.000	0,00	-	3	173.022.000	3	171.903.380	100,00%	99,35%	3,00	171.903.380	50,00%	18,26%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	264,00	72.520.000	0,00	-	36	5.520.000	36	5.520.000	100,00%	100,00%	36,00	5.520.000	13,64%	7,61%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8,00	59.050.000	0,00	-	4	15.750.000	4	14.132.000	100,00%	89,73%	4,00	14.132.000	50,00%	23,93%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	320,00	1.506.611.200	0,00	-	160	672.412.200	156	629.642.441	97,50%	93,64%	156,00	629.642.441	48,75%	41,79%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	194,00	3.025.600.000	0,00	-	100	1.686.764.500	100	1.664.124.301	100,00%	98,66%	100,00	1.664.124.301	51,55%	3940,50 %
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	24,00	264.900.000	0,00	-	1	42.800.000	1	42.600.000	100,00%	99,53%	1,00	42.600.000	4,17%	16,08%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	62,00	2.741.500.000	0,00	-	30	882.564.500	30	874.157.600	100,00%	99,05%	30,00	874.157.600	48,39%	31,89%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2,00	19.200.000	0,00	-	4	761.400.000	4	747.366.701	100,00%	98,16%	4,00	747.366.701	200,00%	3892,53 %

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	196,00	1.457.954.520	0,00	-	100	267.258.820	100	229.563.498	100,00%	85,90%	100,00	229.563.498	51,02%	50,30%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24,00	143.554.520	0,00	-	12	26.554.520	12	23.123.660	100,00%	87,08%	12,00	23.123.660	50,00%	16,11%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24,00	1.101.400.000	0,00	-	12	199.904.300	12	165.639.838	100,00%	82,86%	12,00	165.639.838	50,00%	15,04%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24,00	213.000.000	0,00	-	12	40.800.000	12	40.800.000	100,00%	100,00%	12,00	40.800.000	50,00%	19,15%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	190,00	962.120.000	0,00	-	100	202.930.000	98	166.268.811	97,62%	81,93%	97,62	166.268.811	51,38%	53,02%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16,00	287.520.000	0,00	-	8	69.920.000	8	53.756.811	100,00%	76,88%	8,00	53.756.811	50,00%	18,70%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	140,00	440.000.000	0,00	-	70	88.010.000	50	68.523.000	71,43%	77,86%	50,00	68.523.000	35,71%	15,57%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2,00	234.600.000	0,00	-	1	45.000.000	1	43.989.000	100,00%	97,75%	1,00	43.989.000	50,00%	18,75%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah (%)	95,80	14.565.587.990	0,00	-	95,2	3.627.231.300	-	3.568.274.228	0,00%	98,37%	95,00	3.568.274.228		24,50%
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (%)	181,50	14.565.587.990	0,00	-	97,5	3.627.231.300	98	3.568.274.228	100,84%	98,37%	98,32	3.568.274.228	54,17%	285,81 %
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	8,00	585.682.000	0,00	-	4	233.511.000	4	233.097.028	100,00%	99,82%	4,00	233.097.028	50,00%	39,80%

	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	12,00	873.730.000	0,00	-	6	334.871.000	6	331.672.410	100,00%	99,04%	6,00	331.672.410	50,00%	37,96%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	24,00	879.845.000	0,00	-	12	395.515.000	12	378.122.060	100,00%	95,60%	12,00	378.122.060	50,00%	42,98%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	24,00	985.956.600	0,00	-	12	281.220.280	12	280.783.819	100,00%	99,84%	12,00	280.783.819	50,00%	28,48%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	228.000,00	7.098.131.990	0,00	-	114000	1.205.086.000	124.069	1.180.029.570	108,83%	97,92%	124.069	1.180.029.570	54,42%	16,62%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	270,00	1.299.527.400	0,00	-	140	320.404.020	140	320.266.750	100,00%	99,96%	140,00	320.266.750	51,85%	24,64%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	48,00	262.019.000	0,00	-	24	118.674.000	24	111.094.870	100,00%	93,61%	24,00	111.094.870	50,00%	42,40%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	24,00	748.655.000	0,00	-	12	166.257.000	12	163.347.962	100,00%	98,25%	12,00	163.347.962	50,00%	21,82%
	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	195,00	1.832.041.000	0,00	-	98	571.693.000	98	569.859.759	100,00%	99,68%	98,00	569.859.759	50,26%	31,11%

Evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, ditemui beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Faktor pendorong dan penghambat adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dikoordinasikan oleh oleh Sekretariat dalam hal ini Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dan pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan.
2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal.

2. Faktor Penghambat

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai target kinerja, diantaranya sebagai berikut :

1. Masih perlunya penguatan mapping potensi terhadap 11 jenis objek pajak daerah serta pengukuran target penerimaan pajak daerah;
2. Masih rendahnya kesadaran OPD penyelenggara layanan retribusi untuk dapat mengoptimalkan penerimaannya. Hal ini tentunya kurang sejalan dengan semangat pelayanan retribusi khususnya retribusi jasa usaha yang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarifnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

3. Penambahan SDM sudah mendekati kebutuhan target sasaran kinerja, namun masih dapat dioptimalkan untuk melaksanakan pemeriksaan pajak daerah, sehingga atas pelaporan yang tidak sesuai di dalam SPTPD, dapat ditetapkan kembali atas kekurangan dengan penerbitan SKPDKB atas hasil pemeriksaan;
4. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat terkait dengan alokasi dan penyaluran dana perimbangan (DAU, DAK, DBH,dll) mulai dari perhitungan penetapan yang kadang – kadang sangat cepat berubah;
5. Masih lemah dan belum tegasnya sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib pajak (utamanya atas wajib pajak daerah);
6. Masih kurangnya pemahaman wajib pajak daerah terhadap regulasi yang ada terkait perpajakan daerah, serta kurangnya koordinasi dengan OPD lain terkait perhitungan volume atau potensi pajak;
7. Minimnya pengetahuan wajib pajak terkait dengan adanya inovasi berupa aplikasi pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara on line.

3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut atas capaian kinerja yang kurang dan tidak optimal, maka ditindaklanjuti yaitu melakukan kajian dan evaluasi secara mendalam, analisis masalah dan optimalisasi sumber daya yang ada sehingga dapat mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang optimal.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, pada dasarnya kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai tulang punggung pembangunan daerah yang terus bekerja keras dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan guna memperkuat keuangan daerah.

Dalam upaya pencapaian program tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- a. Untuk aspek Pendapatan Asli Daerah : kurangnya kesadaran wajib pajak, kurang optimalnya pengetahuan wajib pajak terhadap pemanfaatan IT dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah penghasil.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk aspek Pendapatan Asli Daerah : mengadakan penyuluhan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannyadan penanganan yang lebih persuasive, memaksimalkan campaign inovasi perpajakan berbasis IT, kurangnya koordinasi dengan OPD penghasil tentunya dapat diatasi dengan evaluasi yang lebih rutin serta media komunikasi yang lebih intensif.

Demikian juga untuk menjawab tantangan transformasi digital perpajakan daerah dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dan penatausahaan pada sisi Bapenda, maka penguatan digitalisasi pajak daerah terus kami tingkatkan. Beberapa transformasi digital tersebut adalah adanya dashboard pelayanan pajak berbasis web antara lain : SISMIOP, BPHTB On Line

Termasuk perluasan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) dengan diperluasnya kanal pembayaran berbasis tempat pembayaran (Bank Sulselbar, Qris, Indomaret, Alfamart) dan berbasis E-Commerce (Ovo,Tokopedia, Shopeepay) yang bertujuan untuk menjangkau seluas – luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan kedepan akan dikembangkan untuk seluruh pelayanan pajak daerah.

Bahwa optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah dalam menopang PAD sesungguhnya masih dapat ditingkatkan. Penyesuaian besaran retribusi daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana effort atas besarnya beban operasional layanan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu yang di dalam pemungutan retribusinya tidak hanya menutup sebagian biaya operasional layanan dimaksud, namun dalam layanan jasa usaha mampu bersaing dengan penyedia dari luar pemerintah daerah.

Adapun dalam upaya pencapaian dan proyeksi pendapatan tahun 2024 dan 2025, dapat kami sampaikan untuk aspek pendapatan sebagaimana dalam tabel 2.3 dan 2,4 sebagai berikut :

Tabel 2.3

PERKIRAAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024

UARAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI	
		REALISASI (1 JAN S/D 29 MARET 2024)	%
Pendapatan	1.910.663.329.895,00	403.921.016.928,00	21,14
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	391.302.390.695,00	56.587.075.222,00	14,46
Pajak Daerah	207.090.490.085,00	36.140.907.110,00	17,45
Retribusi Daerah	8.629.471.620,00	268.318.808,00	3,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.391.000.000,00	0,00	0,00
Lain – Lain PAD yang Sah	127.191.428.990,00	20.177.849.304,00	15,86
Pendapatan Transfer	1.466.477.122.000,00	346.810.412.057,00	23,65
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.192.815.938.000,00	306.092.496.330,00	25,67
Dana Perimbangan	1.067.419.166.000,00	306.092.496.330,00	25,67
Dana Insentif Daerah (DID)	15.230.394.000,00	0,00	0,00
Dana Desa	109.966.378.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Provinsi	273.861.184.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil	77.265.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	12.500.000.000,00	0,00	0,00
Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	52.883.817.200,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	47.904.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.559.059.000,00	0,00	0,00
Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan	18.881.619.868,00	0,00	0,00

Tabel 2.4

PROYEKSI PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

UARAIAN	TARGET (Rp)
Pendapatan	1.981.918.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	398.551.713.454,00
Pajak Daerah	220.838.456.000,00
Retribusi Daerah	5.375.478.750,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	49.391.000.000,00
Lain – Lain PAD yang Sah	122.946.778.704,00
Pendapatan Transfer	1.523.313.750.546,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.243.626.684.000,00
Pendapatan Transfer Provinsi	267.187.066.545,00
Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	60.052.536.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	54.904.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.589.477.000,00
Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan	2.589.477.000,00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Luwu Timur.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu timur terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
 2. Sub Bidang Penyuluhan, Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah
 2. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - a. Sub Bidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dalam mencapai target pendapatan daerah dan melihat potensi PAD yang ada di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 pada Misi 4 yaitu **Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik** dengan tujuan **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan**

Sumber Sumber Belanja Daerah, maka dalam pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Permasalahan

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan dibidang pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas pendapatan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Adanya landasan hukum yang mengatur keberadaan organisasi, dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara jelas pula
3. Telah adanya landasan hukum yang jelas dan baku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mengatur secara jelas regulasi mengenai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
4. SDM yang memadai, sarana, prasarana peralatan dan teknologi yang tersedia memadai dan proporsional

5. Untuk pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah yang salah satunya melalui penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kab.Luwu Timur juga berinovasi melalui :
- LAKELLING (Layanan Keliling)**
Menghadirkan Layanan Pajak Daerah Keliling dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah yang terfokus di pelayanan dan percepatan pembayaran pajak
 - SARTIKA (Satu Qris Satu Unit Kerja)**
Dengan tujuan menekan pembayaran tunai ke non tunai, meminimalisir lost penerimaan pendapatan di sektor perangkat daerah/unit kerja dalam pengelolaan pendapatan, mewujudkan Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Luwu Timur khususnya penggunaan QRIS yang merupakan program nasional
 - SI OCA (Sistem Informasi One Click Away)**
Sebagai Reminder/pengingat otomatis terkait pelaporan pajak untuk meningkatkan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, memberikan informasi yang berkaitan tentang pajak secara on line dengan sasaran para wajib pajak daerah Kabupaten Luwu Timur
 - SIPAKATAU (Sistem Pajak Daerah Terpadu)**
Meningkatkan pelayan publik atau masyarakat dalam hal pengadministrasian pajak daerah secara on line
 - Pembayaran PBB-P2 Secara E-Commerce**
Mengoptimalkan pembayaran PBB-P2 melalui kemudahan pelayanan pembayaran berbasis digital melalui : Ovo, Shopee
Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat mengharuskan pelayanan publik untuk segera dibenahi menuju pelayanan digital yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
6. Telah adanya teknologi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA) yang merupakan sebuah platform sistem yang mempunyai 2 fungsi utama, yakni sebagai pengelola database, dimulai dari pendaftaran, pelaporan, penetapan, pembuatan kode billing sampai dengan penyajian laporan. Simpada juga memiliki fungsi API (Aplication Procesing Interface) yang bisa menghubungkan Simpada dengan sistem lainnya

7. Adanya teknologi informasi yang menggunakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dalam mendukung manajemen pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
8. Dukungan alokasi dana yang bersumber dari APBD untuk kegiatan operasional maupun yang bersifat incidental
9. Terjalinnnya kemitraan dana yang bersumber dari APBD untuk kegiatan operasional maupun yang bersifat incidental
10. Adanya integrasi sitem perpajakan daerah dengan BPN atas kewajiban lunas BPHTB didalam proses peralihan hak atas bumi dan bangunan.

Dari hasil kinerja diatas beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan di bidang pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Keteragantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat terkait dengan alokasi dan penyaluran dana perimbangan (DAU,DAK,DBH dll) mulai dari perhitungan penetapan yang kadang – kadang sangat cepat berubah
2. Masih lemah dan belum tegasnya sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib pajak (utamanya wajib oajak daerah)
3. Masih kurangnya pemahaman wajib oajak daerah terhadap regulasi yang ada terkait perpajakan daerah, serta kurangnya koordinasi dengan OPD lain terkait perhitungan volumen atau potensi pajak

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi, maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Adapun pokok rencana kerja yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Melibatkan seluruh OPD pengelola pendapatan dalam rangka Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Luwu Timur
2. Penggalan seluruh potensi pendapatan daerah baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi
3. Pemutakhiran data wajib pajak (data lama dan baru)
4. Harmonisasi dan revisi kebijakan
5. Penguatan Pengawasan
6. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

7. Evaluasi

Pencapaian kinerja pelayanan dibidang pendapatan daerah yang memuat indikator, IKK, target Renstra Perangkat Daerah, realisasi capaian serta proyeksi tahun (n) dan tahun (n+1) sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2021 (kondisi awal)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2021 (kondisi awal)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2021 (kondisi awal)	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase penerimaan pendapatan daerah	95,00	95,00	95,20	103,42	107,16	100,10	95,00	95,00	95,20	
2	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	21,32	23,11	23,93	19,74	19,69		21,32	23,11	23,93	

2.3.ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi – inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi potensi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Meningkatkan pengawasan untuk memperkecil kebocoran pemungutan
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan Penerimaan Dana Perimbangan

5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal baik Pusat atau Propinsi untuk penguatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

Sumber Daya Manusia Aparatur

- 2.3.1.1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan
- 2.3.1.2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
- 2.3.1.3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pendapatan yang lebih baik dalam meningkatkan pendapatan guna kesinambungan pembangunan
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025

Reviuw terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan. Berdasarkan analisis tersebut, RKPD telah sesuai dengan analisa kebutuhan, baik rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dananya. Catatan yang perlu disampaikan adalah pagu dana indikatif tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Besaran pagu Tahun 2025 sebesar Rp. 19.457.645.050. Hasil analisis kebutuhan pada review terhadap RKPD, disajikan sebagaimana tabel T-C 31 sebagai berikut :

Tabel T-C 31
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Luwu Timur	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	16.738.729.650	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Luwu Timur	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	16.738.729.650	
a.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	105.987.300	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	78.142.300	
1.	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2	78.829.000	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2	60.642.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.000.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.177.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Lapran hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	3.000.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Lapran hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	3.000.300	

6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	11.323.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	11.323.000	
b	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	15.019.781.880	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	15.019.781.880	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	29	14.895.236.880	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	29	14.895.236.880	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	12	21.372.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	12	21.372.000	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKP	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (laporan)	19	103.173.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKP	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (laporan)	19	103.173.000	
c	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100	15,094,000	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100	15,094,000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	4	15.094.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	4	15.094.000	
E	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	369,517,000	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	369,517,000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Luwu Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	52	35.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Luwu Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	52	35.500.000	

			Kelengkapannya (Paket)					Kelengkapannya (Paket)			
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	12	43.160.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	12	43.160.000	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan (orang)	450	54.452.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan (orang)	450	54.452.000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan (orang)	29	236.405.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan (orang)	29	236.405.000	
F	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100	719.909.300	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100	719.909.300	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3	5.290.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3	5.290.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	2	2.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	2	2.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	24	7.435.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	24	7.435.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	4	210.771.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	4	210.771.500	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan – undangan yang disediakan (dokumen)	36	5.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan – undangan yang disediakan (dokumen)	36	5.040.000	

6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan tamu yang difasilitasi (laporan)	4	11.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan tamu yang difasilitasi (laporan)	4	11.250.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	160	478.122.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	160	478.122.800	
g.	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	1.214,850,000	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	1.214,850,000	
1	Pengadaan Mebel	Kab. Luwu Timur	Jumlah unit mebel yang disediakan (unit)	3	15.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Luwu Timur	Jumlah unit mebel yang disediakan (unit)	3	15.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	2	60.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	2	60.000.000	
h	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	270,245,170	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	270,245,170	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	25.445.170	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	25.445.170	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	204.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	204.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	40.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	40.800.000	
i	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	191.040.000	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	191.040.000	

	PEMERINTAHAN DAERAH					PEMERINTAHAN DAERAH					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu Timur	Jumlah kendaraan perorangan atati kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	12	55.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu Timur	Jumlah kendaraan perorangan atati kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	12	55.280.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	34	64.760.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	34	64.760.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi (unit)	1	71.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi (unit)	1	71.000.000	
C	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (%)	100	2.718.915.400	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (%)	100	2.718.915.400	
a.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (%)	100	2.718.915.400	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (%)	100	2.718.915.400	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah (dokumen)	4	123.010.800	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah (dokumen)	4	123.010.800	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah (dokumen)	6	333.811.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah (dokumen)	6	333.811.000	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah (laporan)	12	194.430.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah (laporan)	12	194.430.000	
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek	12	225.039.600	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek	12	225.039.600	

			pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (laporan)					pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (laporan)			
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Luwu Timur	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya (Objek Pajak)	116.000	1.037.856.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Luwu Timur	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya (Objek Pajak)	116.000	1.037.856.000	
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah (dokumen)	350	291.184.400	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah (dokumen)	350	291.184.400	
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah (Layanan)	24	52.119.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah (Layanan)	24	52.119.000	
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi (laporan)	12	132.886.800	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi (laporan)	12	132.886.800	
9	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pajak Daerah (dokumen)	12	328.577.800	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pajak Daerah (dokumen)	12	328.577.800	
	Jumlah				19.457.645.050	Jumlah				19.457.645.050	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan dibidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran berposisi sebagai pendorong tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui program – pogram dan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Terkait dengan tugas pokok tersebut dapat diartikan pula bahwa Badan Pendapatan Daerah tidak melaksanakan kegiatan secara langsung berupa program dan kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat atau kelompok masyarakat pemangku kepentingan (stakeholder), sebagaimana tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

Nama PD : Badan Pendapatan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

2.6. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan dibidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran berposisi sebagai pendorong tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui program – program dan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Sesuai dengan hasil

musrenbang yang telah dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, Badan Pendapatan Daerah tidak menerima usulan program dan kegiatan dalam Musrenbang Kecamatan sebagaimana tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
Kabupaten Luwu Timur

Nama PD : Badan Pendapatan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

2.7. SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANTAR PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan dibidang urusan keuangan bagian pendapatan. Urusan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan oleh dua OPD yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai pelaksana urusan keuangan bagian belanja dan Badan Pendapatan Daerah sebagai pelaksana urusan keuangan bagian pendapatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah memiliki Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Bapenda sesuai dengan tupoksinya. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan programnya melaksanakan kerja sama dengan OPD – OPD penghasil Retribusi Daerah dalam rangka mengelola pendapatan daerah uang dihasilkan oleh OPD – OPD penghasil Retribusi Daerah. Selain dengan OPD penghasil Bapenda juga mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi lain yang dilaksanakan guna memperlancar tugasnya dalam mengelola pendapatan daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN Tahun 2020 – 2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara – negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN tahun 2020 – 2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia maju. Untuk itu penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik

Visi Misi Presiden tahun 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020 – 2045. Visi RPJMN tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dengan demikian penyusunan RKPD yang direncanakan, terkait juga dengan penyusunan Renja telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Maka dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur telah disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yaitu menuangkan dalam rencana program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target – target tersebut merupakan ukuran dan keberhasilan kinerja faktor – faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keuangan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan

sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 mengacu kepada Misi 4 yakni Terciptanya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dengan arah kebijakan Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Aparatur Bapenda, Peningkatan kualitas kinerja Aparatur Bapenda, Peningkatan tertib administrasi kinerja Bapenda.

Adapun sasarannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel Meningkatnya Kinerja Pengelolaan
Pendapatan Daerah**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pendapatan dituntut untuk menghasilkan pencapaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 terdiri dari :

Program Utama, Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini mempunyai indikator kinerja yaitu persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah

Program ini mempunyai 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini mempunyai indikator kinerja yaitu persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar. Program ini mempunyai 8 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pendanaan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diatas adalah pagu indikatif terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar Rp. 19.457.645.050

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pendanaan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah pagu indikatif terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal. Besaran pagu indikatif Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar Rp. Rp. 19.457.645.050. Sumber dana pelaksanaan Program/Kegiatan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Uraian kegiatan dari masing – masing Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada :

Tabel 4.1.

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Sub Kegiatan :
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		Penetapan Wajib Pajak Daerah
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
		Penagihan Pajak Daerah

2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan :
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						19.457.645.050,00						19.457.645.050,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						19.457.645.050,00							19.457.645.050,00	
	5.02	KEUANGAN						19.457.645.050,00							19.457.645.050,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perang2 kat daerah berjalan sesuai standard	100 Persen			96 Persen	16.738.729.650,00						-	16.738.729.650,00	
	5.02.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 Persen			100 Persen	105.987.300,00			-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	105.987.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	15.094.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) PerbaikanTata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4)Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayan Publik yang Inovatif	-		15.094.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01. 2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja kepegawaian daerah	-			100 Persen	489.264.000,00			-	4)Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	489.264.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01. 2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				52 Paket	109.400.000,00	Kecamatan, Semua Kel/Desa Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4)Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang novatif			109.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01. 2.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	55.160.000,00	Kecamatan, Semua Kel/Desa Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4)Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		55.160.000,00	BADAN PENDAPATAN NDAPATAN PENDAPATAN DAERAH

	5.02.01. 2.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang			450 Orang	54.452.000,00	Kab. Luwu Timur, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI (PAD)	-	1.Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 4)Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		54.452.000,00	BADAN PENDAPATAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01. 2.05.00 11	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang – undangan														
			Jumlah Orang Mengikuti Implementasi Peraturan-Undangan				29 Orang	270.252.000,00	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4)Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		270.252.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Disediakan				2 Paket	2.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI (PAD)	-	1)Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 4)Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		2.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	7.435.000,00	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI (PAD)	-	4)Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		7.435.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat</i>				160 Laporan	576.079.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.Perbalkan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 4)Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		576.079.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi</i>	-			100 Persen	75.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4)Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	75.000.000 ,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyerahan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	25.445.170,00	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	1.Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 4)Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		25.445.170,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyerahan Jasa Daya Air dan Disediakan				12 Laporan	204.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.Perbaikan tatakelola p pemerintahan dan pelayanan publik 4)Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		204.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyerahan Jasa Kantor yang Disediakan				12 Laporan		Kab. Luwu Timur, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.Perbaikan tatakelola pemerintahan dan Pelayanan publik 4)Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif Inovatif	-		44.160.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				350 Dokumen	291.184.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 4)Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		291.184.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.0 1.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah															
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				24 Layanan	52.119.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.Perbaikan tatakelola Pemerintahan dan pelayanan publik 4)Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		52.119.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.0 1.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah															
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	132.886.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.Perbaikan tatakelola p emerintaha n dan pelayanan publik 4)Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		132.886.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.0 1.0011	Penagihan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	328.577.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN SLI DAERAH (PAD)	-	4)Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		328.577.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			JUMLAH					19.457.645.050,00							19.457.645.050,00		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai inovasi terkait dengan pencapaian penerimaan daerah sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pembiayaan pembangunan daerah yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku – pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar – benar dikedepankan. Pelaksanaan RENJA ini akan berdampak besar kepada pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur mengingat fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola pendapatan daerah di lingkungan Kabupaten Luwu Timur. Dengan semakin baiknya kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam mengelola pendapatan daerah akan berimbas kepada ketersediaan anggaran yang digunakan untuk menunjang pembangunan daerah.

Ouput Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Daerah yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dalam pelaksanaan tugas demi tercapainya target penerimaan pendapatatn daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur selain menjadi rencana pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Hasil evaluasi pelaksanaan RENJA yang akan disusun di akhir periode RENJA akan menjadi sumber informasi yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang

Malili, April 2024

KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH,



MUHAMMAD SAID, SE,MM

Pangra Pembina

NIP. 19790313 200502 1 010